

Pengukuran Elastisitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Peramalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Jaqueline Ruth Davischa Situmorang¹, Mohammad Yamin Noch^{2*}

¹ Program Studi Akuntansi , Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

² Fakultas Ekonomi, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

* email : abienoch12@gmail.com

Received :
12 Juni 2017

Revised :
3 Agustus 2017

Accepted :
4 September 2017

Available online :
9 September 2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Jayapura. Responden dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian keuangan, program dan evaluasi, bendahara keuangan dan staf bagian keuangan pada 15 dinas, 13 badan, 8 kantor dan Inspektorat. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 132 responden.

Metode pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan dan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Jayapura dan pengujian secara simultan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Jayapura.

Kata kunci : Akuntabilitas Kinerja, Sasaran Anggaran, pengendalian, Sistem pelaporan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of clarity of budget targets, accounting controls and reporting systems on the performance accountability of SKPD Kabupaten Jayapura. Respondents in this study were head of sub-division of finance, program and evaluation, treasurer of finance and finance staff at 15 offices, 13 agencies, 8 offices and Inspectorate. The number of samples in this study were 148 respondents.

Method of data processing using multiple linear regression analysis. The result of partial test shows that clarity of budget target, accounting control has significant effect and reporting system has no effect on performance accountability of SKPD of Jayapura Regency and simultaneous test shows a significant positive influence to performance accountability of government institution in Jayapura Regency.

Keyword : Performance Accountability, Budget Objectives, controls, Reporting systems

1. Pendahuluan

Tuntutan terselenggaranya good corporate governance dalam Implementasi penerapan otonomi daerah, tidak sekedar tuntutan yuridis formil, tetapi lebih dari itu adalah suatu bukti nyata adanya tuntutan atas peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 32 tahun 2004.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, terutama mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan. Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan Negara ini menjadi dasar dan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah yang lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (LAN, 2003). Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengendalian intern akuntansi adalah menurut tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP 2000) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan.

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis secara parsial maupun simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Jayapura. Sehingga diharapkan memberikan kontribusi guna menambah kajian penelitian tentang akuntansi sektor publik pada Fakultas Ekonomi khususnya pada program studi akuntansi. Dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan penelitian ini dan bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pegawai instansi SKPD Kabupaten Jayapura dengan melihat aspek-aspek yang ada terlebih dalam kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Serta dapat meningkatkan kualitas kinerja dari setiap SKPD tersebut.

2. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

2.1 Akuntabilitas

Libby dan Luft (1993) menyatakan bahwa :

“Akuntabilitas erat kaitannya dengan seseorang, seseorang dengan akuntabilitas tinggi tentunya akan memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaannya.

Kondisi yang memungkinkan lemahnya pertanggungjawaban serta transparansi juga terdapat pada organisasi pemerintahan maupun swasta, sehingga dengan permasalahan tersebut karyawan / pegawai tidak konsisten dengan pekerjaan dan aturan yang mengikat.”

2.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Direktorat Jendral Otonomi Daerah (2001) dalam Abdullah (2005) menyatakan bahwa arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan (goals) dan sasaran (objectives) yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Kedua komponen arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan jawaban atas “where do we want to be” dalam proses perencanaan strategis. Tujuan merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan tujuan (*destination*) daerah dimasa yang akan datang, sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas (*milestones*) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

H1 : Terdapat pengaruh signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.4 Pengendalian Akuntansi

Pengendalian intern akuntansi adalah menurut tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

H2 : Terdapat pengaruh signifikan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

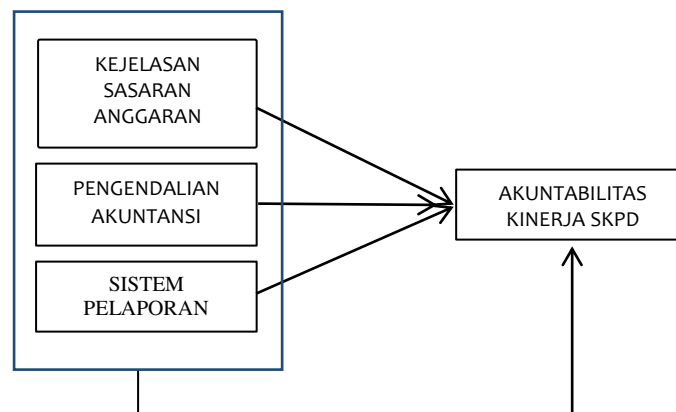
2.5 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah 2005), sedangkan menurut Hansen dan Mowen (1997) sistem adalah “Seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan yang melakukan satu atau lebih proses untuk mencapai tujuan-tujuan khusus”. Menurut Mulyadi (2001) mendefinisikan sistem sebagai “Sekelompok unsur yang erat hubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.”

- H3 : Terdapat pengaruh signifikan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- H4 : Terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menunjukkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait yaitu pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Jayapura.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

3. Metode

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan korelasi dengan pendekatan kuantitatif.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah SKPD di lingkungan Kabupaten Jayapura, dengan jumlah populasi 37 SKPD. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntabilitas kinerja pada SKPD, sehingga sampelnya adalah kepala sub bagian keuangan, program dan evaluasi, bendahara keuangan dan staf bagian keuangan (Hidayattullah dan Herdjianto 2015) pada 15 dinas, 13 badan, 8 kantor dan Inspektorat. Dengan demikian jumlah sampling adalah 148 (seratus empat puluh delapan) kuesioner yang akan dibagikan.

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data subjek dan menggunakan sumber data primer.. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Jayapura.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, jawaban yang diberikan responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui kuesioner yang diberikan peneliti. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan (Noch 2015). Kuesioner yang digunakan mengikuti kuesioner dari Putra (2013), Sitepu (2015) dan Sally (2016). Skala pengukuran data dalam penelitian ini adalah skala ordinal.

3.1 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden. Gambaran tersebut meliputi ukuran tendensi sentral seperti rata-rata, median, modus, kisaran standar deviasi diungkapkan untuk memperjelas deskripsi responden. kemudian langkah selanjutnya dilakukan pengujian kualitas data sebagai berikut :

- a) Uji validitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa masing- masing pertanyaan akan terklarifikasi pada variabel- variabel yang telah ditentukan (*construct validity*).
- b) Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Uji realibilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach's Alpha Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ (Nunnally dalam Ghazali 2006).

3.2 Pengujian Hipotesis

Setelah mendapat model yang baik, maka dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.menggunakan Analisis Regresi Berganda (Uji t), digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen. Dalam menguji hipotesis dikembangkan suatu persamaan untuk menyatakan hubungan antar variabel tak bebas yaitu Y (dalam hal ini Akuntabilitas Kinerja SKPD) dengan variabel bebas. Sehingga H_1 , H_2 dan H_3 diuji dengan membandingkan tingkat signifikansi t dengan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Apabila tingkat signifikansi $t < 0,05$, maka hipotesis diterima.

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ dan $f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 5\% (0.05)$.

Uji determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Karakteristik Responden

Data penelitian dikumpulkan dengan membagikan sebanyak 148 kuesioner yang diantar langsung ke 15 Dinas, 13 Badan, 8 Kantor, dan 1 Inspektorat di Kabupaten Jayapura dengan responden sebanyak 148 orang. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 9 Januari 2017 s/d 18 Januari 2017. Setelah 1 minggu lebih kuesioner yang kembali hanya diperoleh 132 lembar kuesioner.

Kuesioner dihantar secara langsung dengan batas pengambilan 1 minggu setelah pembagian kuesioner.

Kuesioner yang kembali sebanyak 132 dimana semuanya dapat digunakan tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) yang dapat digunakan (*response*) sebesar 89%, dihitung dari prosentase jumlah kuesioner yang kembali (132 kuesioner) dibagi total yang dikirim (148 kuesioner) dan di kali seratus persen (100%).

4.2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel

Jumlah data penelitian (N) adalah sebesar 132 data. Variabel akuntabilitas kinerja dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 39.46 diperoleh standar deviasi akuntabilitas kinerja adalah sebesar 3.493. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa kejelasan sasaran anggaran pada SKPD Kabupaten Jayapura tidak jauh berbeda antar satuan kerja perangkat daerah.

Variabel kejelasan sasaran anggaran dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 30.85 diperoleh standar deviasi kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 2.093. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa SKPD Kabupaten Jayapura dalam pengendalian akuntansi tidak jauh berbeda.

Variabel pengendalian akuntansi dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 29.44 diperoleh standar deviasi pengendalian akuntansi adalah sebesar 2.238. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa SKPD Kabupaten Jayapura dalam pengendalian akuntansi tidak jauh berbeda.

Variabel sistem pelaporan sebesar 17.87, diperoleh standar deviasi sistem pelaporan adalah sebesar 1.321. Nilai standar deviasi sistem pelaporan yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa sistem pelaporan antara SKPD Kabupaten Jayapura sama dengan satuan kerja lainnya.

4.3 Pengujian Instrumen Penelitian

4.3.1 Uji Validitas

Tabel 1.1 Hasil Uji Validitas instrumen penelitian

Item Pernyataan	PValue
Kejelasan Sasaran Anggaran	
Item-1	0,000
Item-2	0,000
Item-3	0,000
Item-4	0,000
Item-5	0,000
Item-6	0,000
Item-7	0,000
Pengendalian Akuntansi	
Item-1	0,000
Item-2	0,000
Item-3	0,000
Item-4	0,000
Item-5	0,000
Item-6	0,000
Item-7	0,000
Sistem Pelaporan	
Item-1	0,000
Item-2	0,000
Item-3	0,000
Item-4	0,000

Akuntabilitas Kinerja	
Item-1	0,000
Item-2	0,000
Item-3	0,000
Item-4	0,000
Item-5	0,000
Item-6	0,000
Item-7	0,000
Item-8	0,000
Item-9	0,000

Sumber: Hasil dari Olah Data 2017

Korelasi antara masing-masing indikator/ item pertanyaan dari variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja signifikan dengan nilai 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Dalam melakukan uji reliabilitas digunakan metode pengukuran reliabilitas alpha Chonbach (α) karena setiap butir pertanyaan menggunakan skala pengukuran interval suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $\alpha > 0,60$ (Nunnally dikutip oleh Ghozali 2006). Hasil Uji Reliabilitas Item pertanyaan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Hasil Uji Reliabilitas Item pertanyaan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Variabel	Cronbach's Alpha
Kejelasan Sasaran Anggara	0,665
Pengendalian Akuntansi	0,674
Sistem Pelaporan	0,759
Akuntabilitas Kinerja	0,749

Sumber: Hasil dari Olah Data 2017

4.4 Hasil Uji Hipotesis

4.4.1 Hasil Uji t

Tabel 1.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Variables	Koefesien	T_{hitung}	p-Value
Konstanta	26,829	4,560	0,000
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,873	7.272	0,000
Pengendalian Akuntansi	-0,301	-2.645	0,009
Sistem Pelaporan	-0,305	-1.577	0,117
F _{hitung}	22.225		0,05
Adj R	0,327		
N	132		

Sumber: Hasil dari Olah Data 2017

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Jayapura, Kejelasan sasaran anggaran memiliki t hitung 7.272 yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja. Dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Jayapura.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Jayapura, Pengendalian akuntansi memiliki t hitung -2.645 dengan tingkat signifikan 0,009 lebih kecil dari 0,05 maka variabel pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Jayapura.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Jayapura. Pengendalian intern akuntansi memiliki t hitung -1.577 dengan tingkat signifikan 0,117 lebih besar dari 0,05 maka variabel sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Jayapura.

4.4.2 Hasil Uji F

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 22.225. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.

4.4.3 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas hasil uji determinasi diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,327 yang mengandung arti bahwa 32,7% variasi besarnya akuntabilitas kinerja bisa dijelaskan oleh variasi kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Sedangkan sisanya 67,3% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.4.4 Kejelasan Sasaran Anggaran

Berdasarkan hasil uji hipotesis kesatu didapatkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif sebesar 0,000 terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Jayapura.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Cahyani dan Utama (2015), Hidayattullah dan Herdjianto (2015), Putra (2014), dan Wahyuni, Surya dan Savitri (2014) yang menemukan bukti empiris bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Lain halnya dengan Amril (2014) yang menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Sijunjung Padang. Berdasarkan teori dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki kejelasan sasaran anggaran yang baik pada kasubag keuangan, program dan evaluasi, bendahara, dan staf keuangan di setiap satuan kerja perangkat daerah. Kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan semakin baik atau besar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dibutuhkan kejelasan tentang anggaran yang telah ditetapkan karena sasaran anggaran yang jelas

menyebabkan proses yang berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan mampu menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi atau instansi.

4.4.5 Pengendalian Akuntansi

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua didapatkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan negatif sebesar 0,009 terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Jayapura, karena hasil t hitung -2.645. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Wahyuni, Surya dan Savitri (2014) yang menemukan bukti bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bila pengendalian akuntansi yang dilakukan semakin besar, maka semakin baik akuntabilitas kinerja instansi pemerintah hal ini menyebabkan tidak akan ada kecurangan dan penyimpangan anggaran terjadi.

4.4.6 Sistem Pelaporan

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga didapatkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan sebesar 0,117 terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Cahyani dan Utama (2015), Hidayattullah dan Herdjianto (2015), dan Amril (2014) yang menemukan bukti empiris bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sistem pelaporan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang berlaku, maka tidak dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran.

4.4.7 Pengaruh Secara Simultan

Secara simultan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Jayapura dengan hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 22.225. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05.

5. Simpulan

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kejelasan tentang anggaran yang telah ditetapkan karena sasaran anggaran yang jelas menyebabkan proses yang berjalan lancar sesuai dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pengendalian akuntansi diharapkan proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi menjamin bahwa sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja yang dilakukan berbeda dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya demi meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kegiatan sistem pelaporan ini tentunya menjamin semua pencatatan akuntansi dan keuangan pemerintah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan akuntabilitas kinerja akan tercapai, sebaliknya apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akuntabilitas kinerja pemerintah daerah akan buruk. Dan Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Jayapura.

5.1 Saran dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya mengambil sampel pada SKPD yang ada di beberapa Kabupaten bahkan Seprovinsi Papua. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas dan Peneliti selanjutnya harus menambah variabel yang lain sehingga akuntabilitas kinerja yang di harapkan bisa tercapai, dengan menambah variabel lain seperti: motivasi, disiplin kerja, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah keuangan.

Masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya penelitian ini jumlah kuesioner yang dapat digunakan hanya 89% dari keseluruhan kuesioner yang disebarkan (100%). Hal ini disebabkan banyaknya responden yang tidak terlalu peduli terhadap pengisian kuesioner karena kesibukan dan keterbatasan waktu yang mereka miliki. Sehingga beberapa kuesioner ada yang hilang bahkan tidak diisi.

Model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 32,7%. Sedangkan 67,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja SKPD.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Hilmi. 2005. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Kompak, No 13:37-67.
- Afilu Hidayattullah, Irine Herdjiono. 2015. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Skpd Di Merauke*. Sripsi. Universitas Musamus Merauke.
- Andarias Bangun. 2009. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Anjarwati, Mei.2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.AAJ 1:2 . 2012.
- Darma, E. S, 2004, *Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi VII, IAI.
- Deki Putra. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Ghosali, Imam. 2005, *SPSS Analisis Multivariate*. Universitas Diponegoro Semarang.

- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003 tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Penerbit LAN.
- Lembaga Admisitrasi Negara. 2001. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Diakses dari: www.lan.go.id, tanggal 17 November 2016.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kelima. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo.2002. *Serial Otonomi Daerah: Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*.ANDI : Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Ni Made Mega Cahyani , I Made Karya Utama 2015. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja*. Skripsi. Universitas Udayana.
- Noch, Muh Yamin dan Husein Syamsier. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2003. *tentang Keuangan Negara*.
- Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2014. *tentang Pemerintah Daerah*.
<http://tu.laporanpenelitian.com/2014/11/24.html>. Diakses tanggal 22 November 2016.
- Vonny Nofisa Amril. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD*. Skripsi. Universitas Negeri Padang
- Wahyuni, Raja Adri Satriawan Surya, Enni Savitri. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi. Universitas Riau.

Bibliografi Penulis

Jaqueline Ruth Davischa Situmorang, Adalah Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua, Indonesia

Mohammad Yamin Noch, Adalah Dosen pada Program Studi Akuntansi Strata Satu dan Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua, Indonesia. email : abienoch12@gmail.com